Indonesian Journal of Social Development Volume: 1, Nomor 2, 2024, *Hal*: 1-13

Tiktok Sebagai Media Sosial dalam Melakukan Kritik terhadap Pembangunan di Lampung

Satria Firdaus[1], Neysa Naila[2], Azzahra Dinar Pramesti[3], Cindy Kartika Sari[4], Dhara Fatimah Azzahra[5]. Deni Angela[6]

1 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2110413003@mahasiswa.upnvj.ac.id
2 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2210413162@mahasiswa.upnvj.ac.id
3 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2210413186@mahasiswa.upnvj.ac.id
4 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2210413198@mahasiswa.upnvj.ac.id
5 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2210413199@mahasiswa.upnvj.ac.id
6 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, deniangela@upnvj.ac.id

Abstrak: TikTok, sebagai salah satu platform media sosial yang paling populer telah mengubah paradigma komunikasi dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat saat ini. Dalam konteks ini, konten kreator TikTok, seperti Bima Yudho telah menggunakan platform ini untuk menyampaikan kritik terhadap pembangunan Provinsi Lampung. Namun, penggunaan TikTok untuk menyampaikan kritik juga memiliki risiko, seperti yang dialami Bima Yudho yang dilaporkan ke pihak berwajib terkait pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pada artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara literature review dan mencari sumber terdahulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana TikTok sebagai media sosial dapat menjadi alat untuk mengkritik pembangunan di Lampung. Hasil dan pembahasan penelitian ini yaitu dapat dikatakan pengguna TikTok menunjukkan keaktifan mereka dalam menyampaikan opini kritis terhadap pembangunan di Lampung dengan menggunakan kreativitas dan kecakapan mereka menggunakan fitur-fitur TikTok untuk menyuarakan pandangan mereka dan berpartisipasi dalam perdebatan publik mengenai isu-isu pembangunan yang relevan.

Keywords: Media Sosial, TikTok, Pembangunan, Lampung.

DOI: https://doi.org/10.47134/jsd.v1i2.1882
*Correspondensi: Satria Firdaus, Neysa Naila, Azzahra Dinar P, Cindy Kartika S, Dhara Fatimah A, Deni Anggela
Email: 2110413003@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210413162@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210413186@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210413198@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210413199@mahasiswa.upnvj.ac.id, deniangela@upnvj.ac.id
Received: 14-11-2023
Accepted: 18-12-2023
Published: 24-01-2024

Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract: *In TikTok, as one of the most popular social media platforms, has changed the paradigm of communication and has become a source of information for today's society. In this context, TikTok content creators, such as Bima Yudho, have used this platform to convey criticism of the development of Lampung Province. However, the use of TikTok to convey criticism also carries risks, as experienced by Bima Yudho who was reported to the authorities regarding violations of the Information and Electronic Transactions (ITE) Law. In this article, the author uses a qualitative research method by means of a literature review and looking for previous sources. The purpose of this research is to find out how TikTok as a social media can be a tool to criticize development in Lampung. The results and discussion of this research are that it can be said that TikTok users show their activeness in conveying critical opinions on development in Lampung by using their creativity and skills in using TikTok features to voice their views and participate in public debates on relevant development issues.*

Keywords: *Social Media, TikTok, Development, Lampung.*

Pendahuluan

Dikutip dari laman (Indonesia.Go.Id - Memenuhi Layanan Digital Hingga Pelosok, 2023) tentang pengguna internet pada tahun 2023, berdasarkan hasil survei APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), terjadi peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia dalam setahun terakhir. Menurut data APJII, jumlah pengguna di Indonesia mencapai 215,63 juta orang pada periode 2022-2023. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 2,67 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yang tercatat sebanyak 210,03 juta pengguna. Jumlah pengguna internet tersebut merupakan 78,19 persen dari total populasi Indonesia yang mencapai 275,77 juta jiwa. Persentase ini mengalami peningkatan sebesar 1,17 persen poin dibandingkan dengan periode 2021-2022 yang sebelumnya 77,02 persen. Perkembangan internet dalam era teknologi sekarang yang berdampak pada munculnya media sosial telah menggeser cara-cara tradisional dengan cara yang lebih praktis dan dapat diakses secara mudah melalui media sosial(Ndlovu, 2022). Dengan mudahnya cara mengunduh aplikasi, informasi yang diinginkan menjadi lebih mudah ditemukan. Media sosial telah menjadi salah satu platform yang memainkan peran penting dalam masyarakat modern. Media sosial juga telah mengubah cara kita berinteraksi, mendapatkan informasi, dan menyampaikan pesan.

Berdasarkan hasil survei (TikTok Jadi Medsos Utama Gen Z Untuk Cari Informasi Pada 2022, 2022), dalam beberapa tahun terakhir khususnya tahun 2022, TikTok merupakan platform media sosial yang paling populer digunakan oleh generasi Z atau masyarakat sekarang sebagai sumber informasi. Dalam survei tersebut, sebanyak 24% dari responden yang tergolong dalam kelahiran 1997-2012 menggunakan TikTok untuk mencari informasi. Popularitas TikTok sebagai media sosial telah meningkat dengan pesat di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia (Dey, 2023). TikTok menawarkan penggunaannya yang mudah, konten yang menarik, dan interaksi yang langsung, menjadikannya salah satu platform yang paling diminati oleh pengguna muda. Di Indonesia, TikTok telah menjadi alat komunikasi yang sangat populer, digunakan oleh jutaan orang untuk berbagi video pendek tentang berbagai topik(Kholidah, 2020). Di samping menjadi sumber hiburan dan kontek kreatif, TikTok juga telah menjadi platform yang digunakan untuk menyuarakan pendapat, termasuk kritik terhadap isu-isu sosial, politik, dan pembangunan. Dalam konteks ini, TikTok dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk menyampaikan kritik sosial terhadap berbagai isu, termasuk isu pembangunan di daerah tertentu (Eun, 2023).

Dalam menyampaikan kritik di platform TikTok, terdapat Konten kreator TikTok atau TikTokers yaitu Bima Yudho menjadi trending topik di Twitter dengan tagar #Bima. Tagar tersebut banyak membahas mengenai Bima Yudho yang belum lama ini menghebohkan warganet usai memberikan kritikan mengenai pembangunan Provinsi Lampung yang tak kunjung maju (Soal Kritik TikToker Bima Terhadap Pembangunan Di Lampung, Harusnya Pemprov Lakukan Evaluasi, 2023). Diketahui pemuda asal Lampung Timur itu mengunggah kritikannya mengenai Provinsi Lampung di akun TikToknya, @awbimaxreborn dengan durasi 3 menit 28 detik. Video itu pun akhirnya menjadi sorotan hingga akhirnya Bima dilaporkan ke pihak yang berwajib terkait pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). (Soal Kritik TikToker Bima Terhadap

Pembangunan Di Lampung, Harusnya Pemprov Lakukan Evaluasi, 2023) Kritik yang dilakukan Bima dalam akun TikToknya terhadap pengambil kebijakan sangat diperlukan sebagai evaluasi kinerja (Scotto, 2021). Sehingga, pemerintah bisa mengambil langkah perbaikan. Terlebih substansi kritik yang disampaikan merupakan fakta yang memang terjadi di Lampung. Seluruh pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Lampung harus lebih terbiasa menerima kritik di media sosial karena sosial media saat ini menjadi wadah bagi Opini Publik untuk mengkritisi atas kinerja Pemerintah (Dunn, 2022).

Metode

Metode penelitian digunakan untuk memperoleh informasi dengan tujuan tertentu dan menerapkannya secara ilmiah. Dalam penulisan makalah ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka atau library research (Alshakhanbeh, 2022). Sumber-sumber pustaka yang relevan dengan urgensi dan permasalahan yang diambil penulis digunakan untuk membentuk rumusan masalah. Tahapan pengumpulan data yang dapat dipercaya dilakukan berdasarkan bab dan literatur, diikuti dengan pemecahan masalah yang esensial melalui analisis kritis terhadap studi pustaka yang relevan. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa sumber penelitian seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, referensi statistik, website partai politik, serta skripsi, tesis, dan disertasi lain yang berkaitan (Li, 2023). Oleh karena itu, penggunaan metode deskriptif kualitatif mendorong penelitian ini untuk menjadi lebih komprehensif dan menyeluruh, sehingga menghasilkan informasi yang lengkap mengenai "Tiktok Sebagai Media Sosial Dalam Melakukan Kritik Terhadap Pembangunan di Lampung". Selain menerapkan metode deskriptif kualitatif, penulis juga mengadopsi metode literature review dalam penelitian ini. Metode literature review digunakan dengan tujuan untuk memperoleh dasar teoritis yang dapat membantu dalam pemecahan masalah yang sedang diselidiki (Gomez-Mejia, 2020). Melalui metode ini, penulis dapat mengumpulkan berbagai teori yang relevan yang akan menjadi landasan utama untuk memahami permasalahan dengan lebih baik. Selain itu, dokumen-dokumen seperti jurnal ilmiah dan buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian menjadi sumber informasi yang sangat penting dan menjadi acuan utama dalam penelitian ini (Teurlings, 2018).

Kajian Literatur

Penelitian relevan yang menjadi acuan dalam penelitian ini, antara lain:

1. (Firamadhina, 2023) yang berjudul Perilaku Generasi Z Terhadap Pengguna Media Sosial Tiktok: Tiktok Sebagai Media Edukasi dan Aktivisme. http://journal.unpad.ac.id/share/article/view/31443/15062

   Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perilaku generasi z terhadap Tiktok yang digunakan sebagai media pendidikan dan aktivisme. Metode yang digunakan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah Tiktok dapat digunakan sebagai bentuk pendidikan informal dan aktivisme digital. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah pengguna media sosial di bidang pendidikan memang bermanfaat, namun perlu lebih banyak penelitian dan model lebih lanjut untuk aplikasinya dalam kegiatannya.

Persamaan jurnal ini dengan jurnal yang kami buat adalah sama-sama membahas tentang penggunaan media sosial Tiktok dalam melakukan aktivisme. Sedangkan, perbedaannya dengan jurnal kami adalah, jurnasl ini lebih membahas terkait media tiktok yang lebih digunakan untuk pendidikan informal yang bermanfaat.

2. (Alkatiri et al., 2020) yang berjudul Dampak Komunikasi Politik dan Opini Publik Terhadap Perilaku Masyarakat. https://journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana/article/view/14/158.

   Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana dampak komunikasi politik, opini publik, dan media terhadap perilaku masyarakat (Indrawan, 2017). Metode yang digunakan adalah metode deskriptif karena menjelaskan masalah pada penelitiasn yang memuat gambaran mengenai kejadian untuk menggambarkan secara sistematis. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukan bahwa di era digital media adalah sarana paling efektif dalam pembentukan opinbi publik dan partisipasi masyarakat di dalam dunia politik juga dipengaruhi oleh proses komunikasi politik dan opini publik yang beredar di tengah-tengah mereka (Egelhofer, 2021). Kesimpulan dari jurnal ini adalah media membuat peryataan-pernyataan politik (*political statement*) dalam bentuk komentar, editorial, dan pertanyaan wawancara, sesuai dengan kepentingan sendiri dan juga dampak komunikasi politik terhadap keterlibatan masyarakat dalam politik terkait dengan fakta-fakta tentang pemimpin opini (opinion leader). Persamaan ini dengan jurnal yang kami tulis adalag sama-sama membahas terkait dampak opini publik terhadap perilaku masyarakat (Tao, 2021). Sedangkan perbedaannya adalah, jurnal ini lebih memfokuskan membahas tentang komunikasi politik yang merupakan suatu bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan yang bersifat politik.

Landasan Teori

A. Media Sosial

Sosial media atau media sosial merupakan sebuah media bersosialisasi dan berinteraksi satu sama lain yang dilakukan secara daring dan memungkinkan manusia untuk bersosialisasi atau berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Nancy K. Baym (2010) berpendapat, "Media sosial adalah seperangkat alat dan platform komunikasi daring yang memungkinkan individu dan kelompok untuk berinteraksi, berbagi, dan menciptakan konten melalui teks, gambar, suara, dan video." Di era digital saat ini, media sosial memiliki peran yang besar karena tidak bisa lepas dari keseharian semua orang saat ini, semua yang manusia butuhkan ada di media sosial, mulai dari berita sehari-hari, mencari dan melamar pekerjaan, bertukar kabar dengan keluarga ataupun teman lama, dan sebagainya (Yuan, 2022). Namun, di balik manfaatnya, media sosial juga menjadi tempat berbagai kejahatan yang dapat berupa peretasan, penyebaran data pribadi, penipuan, pencurian identitas, pelecehan, pemerasan, dan masih banyak lagi. Seperti yang dikatakan oleh Nur Ainiyah (2018), “Pengaruh negatif media sosial terhadap remaja milenial yang sangat banyak dan meresahkan, perlu dilakukan arahan, tuntunan, bimbingan, panduan, dan pengawalan dari pihak-pihak

seperti orangtua, guru, dan pemangku kepentingan dalam pendidikan anak dan remaja millenial."

Salah satu platform media sosial yang saat ini sedang naik daun adalah TikTok. Pada tahun 2020-2022, aplikasi ini merupakan aplikasi yang paling banyak diunduh di seluruh dunia dengan total unduhan sebanyak 672 juta kali menurut riset Apptopia. Aplikasi ini digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang lanjut usia atau lansia (Zhang, 2021). Aplikasi TikTok menyediakan fasilitas berbagi video pada penggunanya, bahkan kini TikTok juga telah dikembangkan menjadi aplikasi berjualan dan berbelanja online. Menurut Bulele Y. N., dkk (2018), "Aplikasi TikTok dijadikan sebagai ajang eksistensi diri yang bangga untuk ditunjukkan kepada orang lain." Seiring berkembangnya waktu, TikTok tidak hanya menjadi media untuk mencari dan memberi hiburan, tetapi juga telah menjadi media untuk memberikan aspirasi masyarakat terhadap pemerintah.

B. Opini Publik

Opini Publik, berdasarkan etimologinya, merupakan terjemahan dari kosa kata bahasa Inggris, yaitu "public opinion". Jika kita melihat dari sudut asal katanya, "Public Opinion" berasal dari bahasa Latin, yaitu "opinari" dan "publicus". "Opinari" memiliki arti menduga atau berpikir, sedangkan "publicus" memiliki arti sebagai milik masyarakat luas. Menurut Leonard W. Doob, opini publik dapat dijelaskan sebagai pandangan individu atau kelompok masyarakat terhadap suatu permasalahan. Definisi ini menekankan bahwa opini publik terkait dengan sikap manusia, baik secara personal maupun sebagai bagian dari suatu komunitas. Dalam konteks ini, opini publik bukanlah sekadar pandangan individu, tetapi juga mencakup sikap yang terbentuk sebagai anggota dari kelompok sosial yang lebih luas (Ardianto, 2005:103). Proses pembentukan opini publik melibatkan pengalaman individu atau pengalaman yang terjadi dalam kelompok yang mereka ikuti. Pengalaman ini pada akhirnya akan mempengaruhi sikap mereka terhadap suatu permasalahan. Ketika individu terlibat dalam interaksi dengan anggota masyarakatnya, baik melalui dialog informal atau melalui media massa, mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan pemahaman mereka tentang suatu permasalahan dan mempengaruhi serta dipengaruhi oleh pandangan orang lain (Wu, 2021). Opini publik dapat didefinisikan sebagai penggabungan pikiran, perasaan, dan usul yang digunakan oleh warga negara secara pribadi terhadap pilihan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang bertanggung jawab atas ketertiban sosial dalam situasi yang mengandung konflik, pembantahan, dan perselisihan pendapat tentang apa yang akan dilakukan serta bagaimana melakukannya (Dan, 2005). Dalam konteks ini, opini publik merupakan hasil dari interaksi yang kompleks antara individu-individu dalam masyarakat yang berusaha untuk menyampaikan pandangan mereka terhadap kebijakan yang ada dan memberikan masukan terhadap langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah (Zulli, 2022).

C. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan daerah terdiri dari pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pembagian wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Pemerintahan daerah memiliki hak, kewajiban, serta tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan otonomi daerah (Barta, 2021). Hak pemerintahan daerah antara lain mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah, mengelolah kekayaan daerah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, dan mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Hastrida, 2021).

Kewajiban pemerintahan daerah antara lain melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mempertanggungjawabkan pelaksanaan urusan pemerintahan kepada rakyat melalui DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . Tugas dan wewenang pemerintahan daerah antara lain menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi, menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan asas desentralisasi, menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sendiri berdasarkan asas otonomi.

D. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur adalah proses pembangunan fasilitas dasar untuk kepentingan umum yang meliputi bidang transportasi, energi, air, bangunan, pengelolaan limbah, dan lain-lain. Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, keterhubungan antar wilayah, efisiensi dan produktivitas, serta perlindungan lingkungan. Pembangunan infrastruktur menimbulkan multiplier effect secara sosial dan ekonomi, serta menyerap tenaga kerja. Pembangunan

infrastruktur di Indonesia dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan melibatkan sektor swasta dan BUMN. Pembangunan infrastruktur di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyediaan Prasarana dan Sarana Publik melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Undang-undang ini mengatur tentang skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) yang merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam rangka penyediaan prasarana dan sarana publik yang memerlukan investasi besar, jangka waktu penyelenggaraan yang panjang, dan/atau pemanfaatan teknologi tinggi (Suri, 2019a, 2019b). Beberapa contoh proyek infrastruktur yang menggunakan skema KPBU antara lain pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, kereta api, pembangkit listrik, dan lain-lain.

Hasil dan Pembahasan

Di era globalisasi saat ini, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi dari daerah manapun dengan mudah dan cepat. Masyarakat juga dapat mengunggah pendapat dan aspirasi mereka melalui sosial media. Media sosial memfasilitasi masyarakat untuk mengakses dan mendapatkan informasi yang ingin mereka ketahui. Dampak positif dari adanya media sosial adalah, masyarakat yang mampu mendapatkan informasi secara luas. Media Sosial tidak hanya memberikan peluang dan manfaat yang besar bagi masyarakat dan kepentingan bisnis, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam berbagai aspek kehidupan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi. Meskipun penggunaan media sosial sangat mempermudah kehidupan, gaya hidup digital juga semakin bergantung pada penggunaan ponsel dan komputer (Siagian, 2015). Terlepas dari itu, kita seharusnya bersyukur atas kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi ini, namun perlu diingat bahwa setiap penggunaan teknologi tersebut perlu dikendalikan dan dikontrol. Jika penggunaannya berlebihan, kita sendiri yang akan merugi dan mungkin tidak dapat memanfaatkannya secara maksimal.

Pada masa kini, terjadi fenomena yang menarik di dunia digital dengan munculnya media sosial yang telah menjalar ke berbagai lapisan masyarakat, tak terkecuali generasi muda hingga lanjut usia, dan menjadi sarana komunikasi yang dapat diakses secara luas melalui perangkat ponsel yang semakin terjangkau. Dalam konteks ini, terdapat salah satu aplikasi media sosial yang saat ini sedang menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, yaitu TikTok (Pengaruh TikTok Sebagai Platform Masa Kini Terhadap Opini Masyarakat Di Kalangan Remaja Khususnya Mahasiswa, 2023). TikTok telah memperoleh popularitas yang tinggi dan menjadi sebuah platform yang memungkinkan masyarakat untuk mengekspresikan pendapat mereka secara publik dan memberikan kritik terhadap pemerintah. Kelebihan utama TikTok terletak pada kemampuannya untuk menjangkau audiens yang luas, dengan harapan bahwa pendapat individu atau kelompok yang diungkapkan dapat diterima dan mendapatkan dukungan dari masyarakat, serta mendorong respons dan perhatian dari pihak pemerintah. TikTok juga berfungsi sebagai wadah diskusi yang memungkinkan interaksi antara pengguna, baik melalui unggahan

video, komentar, atau melalui tindakan "stitch" untuk menghubungkan dan berbagi pandangan serta pendapat dengan yang lain. Melalui fitur-fitur tersebut, TikTok menjadi ruang publik virtual yang memfasilitasi pertukaran informasi dan dialog antaranggota masyarakat secara interaktif (Tranggono, 2023).

Seperti halnya aplikasi TikTok yang saat ini banyak digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat di berbagai dunia. Di aplikasi ini, masyarakat dapat mengunggah konten berupa video. Konten yang diunggah pun bermacam-macam, ada konten hiburan, edukasi, dan lain-lainnya. Para pengguna dapat mengikuti secara langsung apa saja yang sedang banyak dibicarakan di media sosial ini. Salah satu tema yang sering dibahas di TikTok adalah pembangunan di Lampung. Lampung adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi besar dalam bidang pertanian, industri, pariwisata, dan energi. Namun, Lampung juga menghadapi berbagai tantangan dan masalah dalam pembangunannya, seperti infrastruktur, kemiskinan, lingkungan, dan pelayanan publik. Beberapa pengguna TikTok menggunakan platform ini untuk menyampaikan opini kritis mereka terhadap pembangunan di Lampung. Mereka menggunakan berbagai cara untuk menyuarakan aspirasi dan kritik mereka, seperti membuat video dengan narasi, musik, meme, atau humor; mengomentari video lain yang berkaitan dengan topik tersebut; atau melakukan stitch dengan video lain untuk menambahkan sudut pandang atau argumen mereka.

Beberapa contoh video yang menunjukkan opini kritis pengguna TikTok terhadap pembangunan di Lampung adalah Video dengan judul "Lampung Butuh Sosok seperti Bima Yudho Saputra" yang dibuat oleh akun @kompas.com. Video ini menampilkan potongan-potongan video dari Bima Yudho Saputra atau @awbimaxreborn yang mengkritik berbagai aspek pembangunan di Lampung, seperti infrastruktur, Kota Baru, pendidikan, birokrasi, dan ekonomi. Video ini juga menampilkan tanggapan dari Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim yang mengapresiasi kritik Bima dan mengatakan akan melakukan evaluasi kinerja pemerintah. Video ini mendapatkan lebih dari 1,2 juta tayangan dan 4.000 komentar. Yang kedua yaitu video dengan judul "Kritik Pembangunan Lampung" yang dibuat oleh akun @awbimaxreborn. Video ini menampilkan Bima Yudho Saputra yang berbicara secara langsung kepada kamera dengan nada tegas dan sarkastis. Bima menyebutkan bahwa Lampung adalah provinsi terkaya di Indonesia, tetapi juga provinsi terbodoh karena tidak mampu mengelola sumber daya alamnya dengan baik. Bima juga menyindir pemerintah Lampung yang tidak peduli dengan nasib rakyatnya dan hanya sibuk membangun proyek-proyek yang tidak bermanfaat. Video ini mendapatkan lebih dari 3,5 juta tayangan dan 12.000 komentar.

Dari contoh-contoh video tersebut, dapat dilihat bahwa pengguna TikTok menggunakan berbagai cara untuk menyuarakan opini kritis mereka terhadap pembangunan di Lampung. Pertama, mereka membuat video dengan narasi yang menjelaskan fakta-fakta atau data-data terkait topik pembangunan di Lampung. Selain itu, mereka juga menciptakan video dengan musik, meme, atau humor yang dapat menarik perhatian dan menyampaikan pesan secara implisit atau eksplisit. Selain itu, pengguna TikTok juga aktif mengomentari video lain yang berkaitan dengan topik pembangunan di

Lampung. Mereka memberikan pendapat, pertanyaan, atau klarifikasi terhadap video yang mereka tonton. Selain itu, mereka juga melakukan stitch dengan video lain yang berkaitan dengan topik pembangunan di Lampung. Dalam proses stitch ini, mereka menambahkan sudut pandang atau argumen mereka sendiri untuk memperkaya diskusi tentang pembangunan di Lampung. Melalui berbagai cara ini, pengguna TikTok menunjukkan keaktifan mereka dalam menyampaikan opini kritis terhadap pembangunan di Lampung. Mereka menggunakan kreativitas dan kecakapan mereka dalam memanfaatkan fitur-fitur TikTok untuk menyuarakan pandangan mereka dan berpartisipasi dalam perdebatan publik mengenai isu-isu pembangunan yang relevan.

Opini kritis yang disampaikan oleh pengguna TikTok dapat memiliki dampak positif maupun negatif terhadap pembangunan di Lampung. Dampak positifnya adalah meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap isu-isu pembangunan. Opini kritis yang disampaikan oleh pengguna TikTok dapat memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pembangunan di Lampung, seperti potensi, tantangan, masalah, solusi, dan harapan. Informasi dan edukasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan inklusif. Selain itu, opini kritis juga dapat memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi masyarakat dapat berupa memberikan masukan, saran, kritik, atau dukungan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya; melakukan aksi sosial, advokasi, atau kampanye terkait isu-isu pembangunan; atau melakukan inisiatif dan kolaborasi dengan pihak-pihak lain untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan.

Disamping itu dapat memberikan masukan dan saran yang konstruktif bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Opini kritis yang disampaikan oleh pengguna TikTok dapat menjadi sumber umpan balik yang berharga bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam pembangunan di Lampung. Umpan balik ini dapat memberikan gambaran tentang persepsi, kebutuhan, harapan, dan aspirasi masyarakat terhadap pembangunan di Lampung. Umpan balik ini juga dapat memberikan masukan dan saran yang konstruktif bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kinerja, kualitas, dan dampak dari pembangunan di Lampung. Dengan mendengarkan dan menindaklanjuti opini kritis dari pengguna TikTok, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat meningkatkan akuntabilitas, responsivitas, dan efektivitas mereka dalam menyelenggarakan pembangunan di Lampung.

Selanjutnya yaitu dapat menciptakan ruang dialog dan diskusi yang demokratis dan inklusif. Opini kritis yang disampaikan oleh pengguna TikTok dapat menjadi stimulus untuk menciptakan ruang dialog dan diskusi yang demokratis dan inklusif antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya terkait isu-isu pembangunan di Lampung. Ruang dialog dan diskusi ini dapat menjadi sarana untuk saling bertukar informasi, pendapat, pengalaman, dan gagasan tentang pembangunan di Lampung. Ruang dialog dan diskusi ini juga dapat menjadi sarana untuk menyelesaikan perbedaan, konflik, atau masalah yang ada dengan cara yang damai, rasional, dan konsensual. Dengan adanya

ruang dialog dan diskusi ini, pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dapat membangun komunikasi yang baik, saling menghormati, saling memahami, saling bekerja sama, dan saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama dari pembangunan di Lampung. Dampak negatifnya adalah dapat menimbulkan informasi yang salah atau tidak akurat, dapat menyebarluaskan hoax atau fitnah yang merugikan pihak tertentu, dapat memicu konflik atau polarisasi antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda pendapat, dan dapat mengabaikan etika dan norma komunikasi yang baik.

Namun, di sisi lain, terdapat juga evaluasi yang berbeda terhadap tindakan Bima dalam mengungkapkan kritiknya. Walaupun niatnya mungkin baik, tidak semua kritik yang disampaikan akan diterima oleh pemerintah. Mungkin pemerintah menghadapi keterbatasan sumber daya, memiliki prioritas yang berbeda, atau mempertimbangkan hal-hal lain yang menghalangi mereka untuk segera merespons atau menangani masalah tersebut. Karenanya, efektivitas kritik yang disampaikan oleh Bima mungkin terbatas. Selain itu, dalam menyampaikan kritiknya, penting bagi Bima untuk memperhatikan etika politik. Walaupun dia berhak untuk mengkritik, cara penyampaian yang tidak sopan atau tidak menghormati dapat melanggar etika politik. Jika Bima menggunakan bahasa kasar, menyerang pribadi, atau menyebarkan informasi yang tidak benar, hal tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan atau memperburuk hubungan antara Bima, pemerintah, dan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengungkapkan kritik dengan cara yang membangun, menggunakan argumen yang rasional, dan mengutamakan dialog yang sehat. Secara keseluruhan, evaluasi yang mendukung menunjukkan bahwa tindakan Bima dalam mengungkapkan kritik dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Lampung dengan berjuang untuk peningkatan layanan publik yang lebih baik.

Oleh karena itu, peran TikTok dalam membentuk opini kritis terhadap pembangunan di Lampung harus diimbangi dengan sikap yang bertanggung jawab dan kritis dari pengguna maupun penontonnya. Pengguna harus memastikan bahwa konten yang mereka buat atau bagikan adalah berdasarkan fakta dan data yang valid; menghormati hak dan kewajiban orang lain; dan bersedia mendengarkan dan menghargai pendapat yang berbeda. Penonton harus selektif dalam memilih konten yang mereka tonton atau ikuti; melakukan verifikasi terhadap informasi yang mereka terima; dan berpikir secara rasional dan objektif sebelum memberikan tanggapan atau tindakan.

Simpulan

Jumlah pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan dalam setahun terakhir, mencapai 215,63 juta orang pada periode 2022-2023. Hal ini menunjukkan adaptasi yang tinggi terhadap teknologi internet di Indonesia. Media sosial, seperti TikTok telah mengubah cara kita berinteraksi, mendapatkan informasi, dan menyampaikan pesan. TikTok menjadi platform yang sangat populer di Indonesia, digunakan oleh jutaan orang untuk berbagi video pendek dan menyuarakan pendapat tentang berbagai isu, termasuk isu pembangunan di daerah tertentu. TikTok dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk menyampaikan kritik sosial terhadap berbagai isu. Namun, pengguna TikTok juga

perlu memperhatikan aturan hukum terkait dengan konten yang diunggah, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Media sosial termasuk TikTok, memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk opini publik. Opini publik adalah pendapat, perasaan, dan usul yang digunakan oleh warga negara terhadap kebijakan pemerintah. Komunikasi politik dan opini publik saling terkait dan saling mempengaruhi. Pengguna TikTok menunjukkan keaktifan mereka dalam menyampaikan opini kritis terhadap pembangunan di Lampung dengan menggunakan kreativitas dan kecakapan mereka dalam memanfaatkan fitur-fitur TikTok untuk menyuarakan pandangan mereka dan berpartisipasi dalam perdebatan publik mengenai isu-isu pembangunan yang relevan. Seperti video pengguna TikTok terhadap pembangunan di Lampung yang berjudul "Lampung Butuh Sosok seperti Bima Yudho Saputra" yang dibuat oleh akun @kompas.com. Video ini menampilkan potongan-potongan video dari Bima Yudho Saputra atau @awbimaxreborn yang mengkritik berbagai aspek pembangunan di Lampung, seperti infrastruktur, Kota Baru, pendidikan, birokrasi, dan ekonomi. Secara keseluruhan, evaluasi yang mendukung menunjukkan bahwa tindakan Bima dalam mengungkapkan kritik dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Lampung dengan berjuang untuk peningkatan layanan publik yang lebih baik.

Dalam menyampaikan kritik, pengguna TikTok ataupun media sosial lainnya harus menggunakan etika dasar. Walaupun semoga masyarakat berhak untuk memberi kritik, cara penyampaian yang tidak sopan atau tidak menghormati dapat melanggar etika politik. Oleh karena itu, penting untuk mengungkapkan kritik dengan cara yang membangun, menggunakan argumen yang rasional, dan mengutamakan dialog yang sehat. Secara keseluruhan, evaluasi yang mendukung menunjukkan bahwa tindakan Bima dalam mengungkapkan kritik dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Lampung dengan berjuang untuk peningkatan layanan publik yang lebih baik. Oleh karena itu, peran TikTok dalam membentuk opini kritis terhadap pembangunan di Lampung harus diimbangi dengan sikap yang bertanggung jawab dan kritis dari pengguna maupun penontonnya. Pengguna harus memastikan bahwa konten yang mereka buat atau bagikan adalah berdasarkan fakta dan data yang valid.

Daftar Pustaka

Alkatiri, A. B. M., Nadiah, Z., & Nasution, A. N. S. (2020). Opini Publik Terhadap Penerapan New Normal Di Media Sosial Twitter. *CoverAge: Journal of Strategic Communication*, *11*(1), 19–26.

Alshakhanbeh, S. (2022). A Pragmatic Analysis of Criticism Strategies against Government Policies on Social Media in Jordan: A Gender-Based Investigation. *Jordan Journal of Modern Languages and Literatures*, *14*(2), 263–286. https://doi.org/10.47012/jjmll.14.2.3

Barta, K. (2021). Constructing Authenticity on TikTok: Social Norms and Social Support on the "fun" Platform. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, *5*. https://doi.org/10.1145/3479574

Dan, N. (2005). *Komunikasi Politik*. PT Remaja Rosdakarya.

Dey, S. (2023). It Is All About Criticism: Understanding the Effect of Social Media Discourse on Legal Crowdfunding Campaigns. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, *7*. https://doi.org/10.1145/3579500

Dunn, K. (2022). Speed and symmetry: Developing effective organisational responses to social media criticism of CSR. *Computers in Human Behavior*, *134*. https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107336

Egelhofer, J. L. (2021). Delegitimizing the media? Analyzing politicians' media criticism on social media. *Journal of Language and Politics*, *20*(5), 653–675. https://doi.org/10.1075/jlp.20081.ege

Eun, J. Y. (2023). A media criticism-based approach for designing critical multicultural instruction in social studies curricula. *Pedagogy, Culture and Society*, *31*(1), 129–146. https://doi.org/10.1080/14681366.2021.1891450

Firamadhina. (2023). *PERILAKU GENERASI Z TERHADAP PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TikTok: TikTok Sebagai Media Edukasi dan Aktivisme*. https://www.share.unpad.ac.id

Gomez-Mejia, G. (2020). "fail, clickbait, cringe, cancel, woke": vernacular criticisms of digital advertising in social media platforms. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, *12195*, 309–324. https://doi.org/10.1007/978-3-030-49576-3_23

Hastrida, A. (2021). PROSES PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL PEMERINTAH : MANFAAT DAN RISIKO. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini*, 149–165.

Indonesia.go.id - Memenuhi Layanan Digital hingga Pelosok. (2023). https://www.indonesia.go.id

Indrawan, R. M. J. (2017). Dampak komunikasi politik dan opini publik terhadap perilaku masyarakat. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, *16*(2), 171–179.

Kholidah, N. N. (2020). Traditional stage as a medium of social criticism: The role of humor in Ludruk performance art. *Journal of Critical Reviews*, *7*(7), 1–5. https://doi.org/10.31838/jcr.07.07.01

Li, Y. (2023). The unintended consequence of social media criticisms: an earnings management perspective. *European Journal of Finance*, *29*(1), 33–57. https://doi.org/10.1080/1351847X.2022.2097885

Ndlovu, K. (2022). Ethnic Politics and Aesthetic Criticism: An Analysis of Social Media Discourses About Skhosana Buhlungu's Music. *Critical Arts*, *36*(1), 67–80. https://doi.org/10.1080/02560046.2022.2112727

Pengaruh TikTok sebagai Platform Masa Kini terhadap Opini Masyarakat di Kalangan Remaja Khususnya Mahasiswa. (2023). https://www.kompasiana.com

Scotto, G. (2021). The new social media and the glory: For a theological-political criticism of the functioning of contemporary liberal democracies. *Telos*, *2021*(194), 69–88. https://doi.org/10.3817/0321194069

Siagian, H. F. (2015). *Pengaruh dan efektivitas penggunaan media sosial sebagai saluran komunikasi politik dalam membentuk opini publik*.

Soal Kritik TikToker Bima terhadap Pembangunan di Lampung, Harusnya Pemprov Lakukan Evaluasi. (2023). https://www.kompas.com

Suri, D. (2019a). PEMANFAATAN MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI DALAM PERWUJUDAN PEMBANGUNAN NASIONAL. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 177–187.

Suri, D. (2019b). Pemanfaatan Media Komunikasi dan Informasi dalam Perwujudan Pembangunan Nasional. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, *17*(2), 177–187.

Tao, Y. (2021). Who should apologise: Expressing criticism of public figures on Chinese social media in times of COVID-19. *Discourse and Society*, *32*(5), 622–638. https://doi.org/10.1177/09579265211013116

Teurlings, J. (2018). Social Media and the New Commons of TV Criticism. *Television and New Media*, *19*(3), 208–224. https://doi.org/10.1177/1527476417709599

TikTok Jadi Medsos Utama Gen Z untuk Cari Informasi pada 2022. (2022). https://www.dataindonesia.id

Tranggono, T. (2023). PERAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI WADAH ASPIRASI MASYARAKAT. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*.

Wu, X. (2021). 'Hidden in plain sight': Expressing political criticism on Chinese social media. *Discourse Studies*, *23*(3), 365–385. https://doi.org/10.1177/1461445620916365

Yuan, L. (2022). The effect of advertising strategies on a short video platform: evidence from TikTok. *Industrial Management and Data Systems*, *122*(8), 1956–1974. https://doi.org/10.1108/IMDS-12-2021-0754

Zhang, Y. (2021). Corporate social responsibility disclosure: Responding to investors' criticism on social media. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *18*(14). https://doi.org/10.3390/ijerph18147396

Zulli, D. (2022). Extending the Internet meme: Conceptualizing technological mimesis and imitation publics on the TikTok platform. *New Media and Society*, *24*(8), 1872–1890. https://doi.org/10.1177/1461444820983603